



## Analisis Kinerja Pemerintah Distrik Kemu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan

### *Performance Analysis of the Kemu District Government, Tolikara Regency, Highland Papua Province*

**Yani Wenda<sup>1</sup>, Joyce Jacinta Rares<sup>1\*</sup>, Alfon Kimbal<sup>1</sup>**

<sup>1)</sup> Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan, Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

\* Korespondensi: joycerares09@gmail.com

---

#### **Kata kunci:**

Akuntabilitas;  
Efisiensi sumber  
daya; Kinerja  
pemerintah;  
Otonomi daerah

#### **Keywords:**

*Accountability;  
Resource  
efficiency;  
Government  
performance;  
Regional  
autonomy*

#### **Submit:**

28 April 2025

#### **Diterima:**

10 Mei 2025

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah di Distrik Kemu Kabupaten Tolikara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara langsung dengan responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi produktivitas, efektivitas pelaksanaan program dinilai cukup baik, terlihat dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Namun, efisiensi penggunaan sumber daya masih belum maksimal, terutama dalam penyerapan anggaran, pemanfaatan sarana prasarana, serta optimalisasi SDM aparatur. Responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat tergolong baik, dengan program kerja yang umumnya sesuai dengan kondisi dan permasalahan riil di wilayah distrik. Pemerintah juga cukup tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan lingkungan. Dari aspek akuntabilitas, pelaksanaan program dan kebijakan telah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, tercermin dalam penyusunan laporan kinerja tahunan (LAKIP). Meskipun demikian, peran kepemimpinan dan sistem kelembagaan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kinerja secara menyeluruh.

#### **ABSTRACT**

*This study aims to examine and explain the performance of the government in implementing regional autonomy affairs in Kemu District, Tolikara Regency. The data used in this research are primary data obtained from direct interviews with respondents. The data analysis technique employed is an interactive model of qualitative data analysis. The results of the study indicate that, in terms of productivity, the implementation of programs is considered fairly good, as evidenced by the achievement of the planned objectives. However, the efficiency in the use of resources remains suboptimal, particularly regarding budget absorption, the utilization of facilities and infrastructure, and the optimization of human resources among government officials. The government's responsiveness to community needs is generally good, with work programs largely aligned with the actual conditions and issues in the district area. The government also demonstrates a reasonable level of responsiveness to community aspirations and environmental changes. In terms of accountability, the implementation of programs and policies has been carried out transparently and is accountable, as reflected in the preparation of the annual performance report (LAKIP). Nevertheless, leadership roles and institutional systems still need to be strengthened to support overall performance improvement.*

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengelola kepentingan serta kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi ini ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Tantowi, 2019; Hasjimzum, 2014). Dalam konteks globalisasi, daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, serta potensi dan keberagaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mendorong terjadinya perubahan struktural, fungsional, dan kultural dalam pemerintahan daerah (Bunga, 2020), termasuk pada kecamatan. Jika sebelumnya kecamatan merupakan organisasi daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, kini statusnya tetap sebagai perangkat daerah namun dengan fungsi yang dijalankan berdasarkan prinsip dekonsentrasi. Pasal 224 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kecamatan dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya.

Selain mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan di Papua juga didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, yang memberikan kewenangan khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar mereka. Kekuasaan tersebut mencakup berbagai bidang pemerintahan kecuali bidang politik negara, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, agama, serta peradilan. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus, disediakan pula dana otonomi khusus.

Meskipun telah diberi kewenangan dan dukungan dana otonomi khusus, studi pendahuluan (prasarvei) menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Distrik Kemu Kabupaten Tolikara dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah belum sesuai harapan masyarakat. Permasalahan yang teridentifikasi antara lain: (1) Capaian program/kegiatan belum maksimal, baik dalam urusan pemerintahan umum maupun urusan yang dilimpahkan oleh bupati. Terdapat kekurangan fasilitas kantor, letak kantor camat jauh dari ibu kota, dan rendahnya keterlibatan masyarakat. (2) Sumber daya organisasi, seperti SDM dan keuangan, belum digunakan secara optimal. Perencanaan tenaga kerja belum memadai dan realisasi kontribusi SDM terhadap hasil organisasi masih rendah. (3) Responsivitas pemerintah distrik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat masih kurang. Permasalahan manajerial dan operasional berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas pelayanan. (4) Perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum melibatkan proses musyawarah yang terstruktur antara pemerintah pusat hingga tingkat distrik/kampung. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran masih rendah, ditandai dengan kurangnya komunikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran publik.

Rendahnya kinerja pemerintah distrik tidak hanya berdampak pada pelayanan publik di tingkat distrik, tetapi juga memengaruhi percepatan pembangunan desa-desa di wilayahnya karena pemerintah distrik bertindak sebagai penghubung penting antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal (Mensah *et al.*, 2024). Distrik memiliki peran kunci dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan desa, menyinergikan program lintas sektor, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah (Burhanuddin *et al.*, 2024). Jika koordinasi dan kinerja distrik lemah, maka implementasi program pembangunan di desa juga akan terhambat, termasuk penyerapan anggaran, pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan beberapa indikasi masalah yang diuraikan, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah Distrik Kemu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah.

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah di Distrik Kemu Kabupaten Tolikara.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya tentang konsep kinerja organisasi publik atau pemerintah, selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Tolikara, terutama pemerintah Kecamatan Kemu dalam rangka pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan kinerja pemerintah distrik dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan seseorang dan perilakunya yang dapat diamati. Oleh karena itu menurut Bungin (2010), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengawali atau menjelaskan makna realitas.

### **Objek Penelitian**

Konsep yang diteliti adalah kinerja pemerintah distrik/kecamatan Kemu dalam melaksanakan otonomi daerah. Kinerja pemerintah daerah diartikan sebagai tingkat kemampuan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan permasalahan otonomi daerah, yang merupakan tanggung jawab dan kewenangan utama pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam UU No.23 Tahun 2014 dan PP No. 17. tahun 2018.

Kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dinilai berdasarkan beberapa indikator/dimensi kinerja dari Dwiyanto et al. (2002), yaitu: produktivitas (efektivitas dan efisiensi), kualitas pelayanan, daya tanggap, tanggung jawab dan akuntabilitas. Dimensi kinerja ini dijelaskan di bawah ini:

1. Produktivitas: yaitu tercapainya hasil/tujuan tertentu dari program/kegiatan pemerintah daerah (efektivitas) dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai hasil tersebut.
2. Kualitas pelayanan: maupun kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh pemerintah distrik Kemu.
3. Daya tanggap: hal ini merupakan kemampuan pemerintah kabupaten dalam menanggapi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
4. Kewajiban: kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai prinsip administratif yang benar.
5. Kewajiban: pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atau masyarakat umum.

### **Sumber Data**

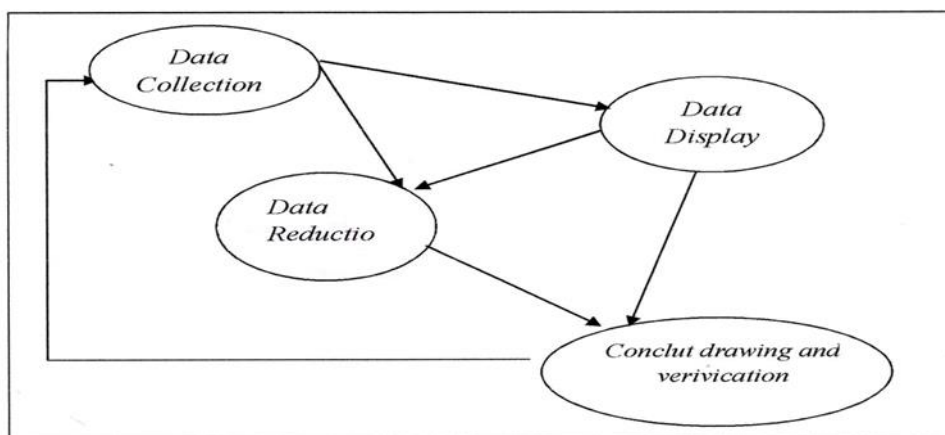
Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang tidak berkaitan dengan jumlah informan dalam sampel melainkan lebih pada isi, relevansi dan sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi yang baik tentang orang, peristiwa atau benda, maka teknik yang tepat adalah dengan meneliti/menentukan data. informan. yaitu menentukan sumber data/informan dengan berdasarkan tujuan tertentu (Sugiono, 2009). Sumber data atau informan dalam penelitian ini terdiri atas: satu orang Camat atau Kepala Distrik, satu orang Sekretaris Kecamatan atau Distrik, tiga orang Kepala Seksi, dua orang Staf atau Pelaksana, serta tiga orang Kepala Desa atau Kampung. Adapun pengambilan data penelitian ini dilakukan pada bulan November 2024.

### Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Namun, merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif; detail tambahan seperti dokumen dan lainnya. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara atau analisis dokumenter (Moleong, 2006; Nilamsari, 2014). Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti sendirilah yang menjadi instrumen penelitian ini; dan metode/teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer terdiri dari wawancara dan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya (*interview guide*). Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan teknik study yaitu pengumpulan, pengelolaan dan pemilihan data yang tersedia di Kantor camat/distrik Kembu Kabupaten Tolikara.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2006), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, mengelompokkan data ke dalam satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermann dalam Rohidi dan Mulyarto (2002), yang prosesnya disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Proses Analisis Data Model Interaktif

Tahapan proses analisis kualitatif model interaktif dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah. Pertama, pengumpulan data dilakukan di lapangan melalui teknik wawancara, serta dibantu dengan teknik observasi dan studi dokumentasi. Kedua, reduksi data dilakukan dengan cara memilih elemen-elemen yang paling relevan berdasarkan tema dan template, yaitu melalui proses seleksi, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian, termasuk setelah pengumpulan data, dengan kegiatan merangkum, menggali tema, dan mengelompokkan ke dalam pola tertentu. Ketiga, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan teks naratif. Keempat, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana temuan dalam penelitian kualitatif ini merupakan hasil-hasil baru yang dapat berupa deskripsi terhadap suatu objek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Distrik Kembu

Distrik/Kecamatan Kembu merupakan salah satu distrik di wilayah Kabupaten Tolikara. Ditrik Kembu awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Jayawijaya setelah kabupaten Jayawijaya dipemakanan maka kemudian distrik Kembu menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tolikara.

Distrik/Kecamatan Kumbu terletak di daerah pengunungan atau dataran tinggi, memiliki luas wilayah 583 km. Distrik Kumbu terletak dengan batas-batas wilayah:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Panaga;
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Gilabandu;
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Gudagi;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Telegeme.

Secara umum Distrik Kumbu mempunyai topografi berdataran tinggi sampai berbukit dan bergunung dengan kemiringan tanah antara 2%-45%. Disebelah timur daya memiliki kemiringan lebih dari 45% sedangkan di sebelah barat selatan dan utara memiliki kemiringan bervariasi antar 2%-45%. Jumlah penduduk Distrik Kumbu sebanyak 3.310 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 1.796 jiwa, perempuan 1.514 jiwa. Pendidikan penduduk usia kerja sebagian besar tidak bersekolah dan berpendidikan SD, sebagian lagi telah menamatkan SMP dan SMA dan hanya sebagian kecil saja yang dapat menjelesaikan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan di Distrik Kumbu terdiri dari TK: 1 Unit taman kanak-kanak dengan jumlah Guru 4 orang, 3 SD yaitu 1 SDN dan 2 SD swasta; 1 SMP Negeri, dan 1 SMA yang masih dalam status persiapan.

Penduduk Distrik Kumbu 100% memeluk agama Kristen Protestan. Mata pencaharian penduduk adalah petani, beternak dan bercocok tanam diantaranya jenis tanaman berjangka panjang maupun berjangka pendek yaitu tanaman Cabe, Kopi, Jagung, Buamerah, Ubi Jalar, Ubi-Ubian, Kacang Tanah, Kacang Kedelai, Sayur-Sayuran serta buah-buahan bahkan sebagainya daerah kampung sudah. Tanaman Utama Penduduk adalah palawija yaitu ubi jalar, ubi kayu, dan keladi. Tanaman palawija ini merupakan makanan pokok masyarakat setempat.

### Hasil Penelitian

Urusan otonomi daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan atau tugas pemerintah kecamatan, baik urusan tugas umum pemerintahan maupun urusan otonomi daerah lainnya yang dilimpahkan oleh bupati. Sedangkan kinerja pemerintah kecamatan/distrik didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan pemerintah Kecamatan/Distrik Kumbu Kabupaten Tolikara dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Kinerja pemerintah Distrik dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah tersebut diamati dari beberapa indikator/dimensi kinerja dari Dwiyanto *et al.* (2002) yaitu: (1) Produktivitas adalah capaian hasil/tujuan program/kegiatan pemerintah Distrik yang ditetapkan (efektivitas), dan efisiensi penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai hasil tersebut. (2) Responsivitas adalah kemampuan pemerintah Distrik dalam menanggapi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. (3) Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pemerintah Distrik kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau kepada masyarakat luas.

### Produktivitas

Dimensi produktivitas dalam penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam program atau kegiatan (Ramdahani & Ramdahani, 2017; Juru, 2020; Sanjaya & Priyadi, 2019), sementara efisiensi merujuk pada rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (Rondonuwu *et al.*, 2015a; Maryanto, 2019; Qosasi & Riharjo, 2022). Efisiensi menekankan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang direncanakan (Dako *et al.*, 2024; Agusnawati *et al.*, 2024; Simanjuntak *et al.*, 2025). Dalam konteks penelitian ini, efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah Distrik Kumbu dievaluasi melalui 12 item pertanyaan pokok yang diajukan kepada para informan. Pertanyaan tersebut mencakup aspek keberhasilan dalam pelaksanaan berbagai tugas pemerintahan, seperti pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketertiban umum, penegakan peraturan, pemeliharaan fasilitas umum, kegiatan pemerintahan, pembinaan desa, pelayanan masyarakat, pelaksanaan urusan otonomi yang dilimpahkan, penanganan tugas pembantuan, realisasi anggaran tahunan, pemanfaatan sarana/prasarana kerja, serta pemanfaatan potensi sumber daya manusia

aparatur distrik. Adapun poin-poin hasil wawancara dengan informan penelitian terkait dimensi produktivitas disajikan selengkapnya dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Wawancara Terkait Dimensi Produktivitas

No	Indikator	Deskripsi	Informan
1	Tingkat keberhasilan pemerintah Distrik dalam penyelenggaraan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Koordinasi dilakukan melalui forum perencanaan (di tingkat kampung dan distrik) serta sinergi antar unit kerja.</li> <li>– Pelaksanaan program pemberdayaan berjalan dengan hasil yang cukup efektif, meskipun cakupannya belum seluruh masyarakat.</li> </ul>	1 – 7
2	Tingkat keberhasilan pemerintah Distrik dalam penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pelaksanaan program berbasis koordinasi erat dengan aparat keamanan (POLRI, TNI, Polsek, Koramil) serta tokoh agama/adat.</li> <li>– Secara umum, situasi ketenteraman dan ketertiban dijaga agar tetap kondusif, meskipun terdapat variabel keterbatasan sumber daya.</li> </ul>	1 – 7
3	Tingkat keberhasilan pemerintah Distrik dalam penyelenggaraan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Implementasi peraturan dilaksanakan melalui koordinasi intensif antara pemerintah distrik, instansi terkait, dan aparat keamanan.</li> <li>– Hasil pelaksanaan umumnya cukup baik, meskipun masih bergantung pada sinergi antar lembaga.</li> </ul>	1 – 7
4	Tingkat keberhasilan pemerintah Distrik dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ketersediaan prasarana dan fasilitas masih relatif minim, meskipun pengelolaannya melalui koordinasi dengan instansi terkait terus dijaga.</li> <li>– Upaya pemeliharaan berjalan dengan intensi untuk meningkatkan kualitas meskipun kendala dana dan keterbatasan sarana sering muncul.</li> </ul>	1 – 7
5	Tingkat keberhasilan pemerintah Distrik dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kegiatan pemerintahan diselenggarakan secara terkoordinasi melalui rapat koordinasi, sistem pelaporan, dan forum bersama antar SKPD serta instansi vertikal.</li> <li>– Hasil pelaksanaan secara umum cukup efektif, meskipun ada keterbatasan sumber daya dan prasarana.</li> </ul>	1 – 7
6	Tingkat keberhasilan pemerintah Distrik dalam penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembinaan dilakukan melalui pengarahan, pengawasan, dan pembinaan tertib administrasi melalui forum resmi dan kunjungan lapangan.</li> <li>– Proses pembinaan belum sepenuhnya optimal, dihadapkan</li> </ul>	1 – 7

		pada kendala dana, keterbatasan SDM, dan prasarana pendukung.	
7	Tingkat keberhasilan pemerintah Distrik dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan secara efektif melalui koordinasi antar instansi, namun hasilnya belum maksimal karena kendala keterbatasan anggaran, prasarana, dan kualitas SDM.	1 – 7
8	Tingkat keberhasilan pemerintah Distrik dalam menangani urusan otonomi daerah yang dilimpahkan/ditugaskan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Urusan otonomi daerah dilaksanakan dengan koordinasi intensif, namun hasilnya sering kali tidak maksimal akibat keterbatasan sarana, dana, dan SDM.</li> <li>– Hasilnya cukup efektif dalam konteks kemampuan yang ada, walaupun masih terdapat potensi perbaikan.</li> </ul>	1 – 7
9	Sejauh mana tingkat keberhasilan pemerintah Distrik dalam penanganan tugas-tugas pembantuan tertentu dari Bupati, Gubernur, atau Pemerintah Pusat?	Pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan koordinasi, namun realisasinya belum maksimal dikarenakan keterbatasan SDM dan sarana/prasarana.	1 – 7
10	Sejauh mana rata-rata tingkat realisasi capaian penyerapan atau penggunaan anggaran oleh pemerintah Distrik pada setiap tahun anggaran?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penyerapan anggaran dinilai cukup baik dengan realisasi rata-rata mencapai di atas 85% bahkan ada yang mendekati 100%.</li> <li>– Anggaran yang terbatas disalurkan pada program-kegiatan prioritas secara efisien.</li> </ul>	1 – 7
11	Sejauh mana sarana/prasarana kerja pada kantor Distrik Kemu telah dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien?	Kondisi sarana/prasarana di kantor masih terbatas, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal dan efisien agar mendukung pelaksanaan tugas.	1 – 7
12	Sejauh mana potensi SDM aparatur pemerintah Distrik Kemu telah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pencapaian hasil yang direncanakan atau ditargetkan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ketersediaan SDM (jumlah dan kualitas) masih dianggap belum memadai.</li> <li>– Meskipun demikian, potensi SDM yang ada diusahakan untuk digunakan seefisien mungkin melalui optimalisasi peran, meskipun keterbatasan kualifikasi (misalnya pendidikan SLTA) masih menjadi tantangan.</li> </ul>	1 – 7

Sumber: Data primer, 2024. Keterangan informan: (1) Camat/Kepala Distrik; (2) Sekretaris Kecamatan/Distrik; (3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan; (4) Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat; (5) Kepala Kampung/Desa Mamit; (6) Kepala Desa/Kampung Yowo; (7) Pegawai Staf/Pelaksana Kantor Camat/Distrik.

Keseluruhan hasil wawancara dengan para informan tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan pemerintah Distrik Kemu baik dalam hal penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati/Pemerintah Kabupaten,

maupun penanganan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah, umumnya dapat dilaksanakan dengan cukup baik namun belum maksimal. Ini dapat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Distrik Kumbu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah sudah cukup baik namun belum maksimal dilihat dari indikator/dimensi produktivitas (efektivitas dan efisiensi).

### Responsivitas

Responsivitas merupakan salah satu indikator kinerja yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam konsep *good governance*, responsivitas bermakna bahwa lembaga-lembaga dan proses-proses harus melayani *stakeholders* (Rondonuwu *et al.*, 2015b; Kaminisubun *et al.*, 2018; Suoth *et al.*, 2014). Dalam konteks organisasi pemerintahan, responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan yang ditetapkan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi pemerintahan dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara program yang ditetapkan dengan kebutuhan masyarakat; hal itu tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi pemerintah dalam mewujudkan misi dan tujuannya. Organisasi pemerintahan yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang buruk juga (Dwiyanto *et al.*, 2002). Poin-poin hasil wawancara dengan informan penelitian terkait dimensi responsivitas dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Wawancara Terkait Dimensi Responsivitas

No	Indikator	Deskripsi	Informan
1	Kesesuaian program dengan permasalahan nyata di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Program disusun berdasarkan rencana strategis yang mempertimbangkan kondisi dan permasalahan lokal.</li> <li>– Melibatkan analisis data lapangan dan masukan dari pemerintah desa dalam perencanaan.</li> <li>– Program mendapat apresiasi masyarakat karena relevan dengan isu nyata.</li> </ul>	1 – 7
2	Kesesuaian program dengan kebutuhan & aspirasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penyusunan program melibatkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah dengan kepala desa, tokoh adat, dan pemuka agama.</li> <li>– Program dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal.</li> <li>– Masyarakat mendukung program karena sesuai dengan harapan mereka.</li> </ul>	1 – 7
3	Kemampuan pemerintah menanggapi permasalahan secara cepat	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pemerintah distrik cepat merespons persoalan masyarakat melalui koordinasi dengan instansi terkait.</li> <li>– Responsivitas dibatasi oleh keterbatasan SDM, anggaran, dan luas wilayah (Informan 2).</li> <li>– Penanganan persoalan dianggap tepat, tetapi belum optimal akibat kendala sumber daya.</li> </ul>	1 – 7 (kendala hanya disebutkan oleh 2)

Sumber: Data primer, 2024. Keterangan informan: (1) Camat/Kepala Distrik; (2) Sekretaris Kecamatan/Distrik; (3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan; (4) Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat; (5) Kepala Kampung/Desa Mamit; (6) Kepala Desa/Kampung Tiyoga; (7) Pegawai Staf/Pelaksana Kantor Camat/Distrik Kumbu.

Hasil wawancara memberikan gambaran bahwa pemerintah Distrik Kumbu cukup responsif dalam menyusun program dan kegiatannya dalam rangka pelaksanaan urusan otonomi daerah dilihat dari beberapa aspek seperti kesesuaian program dan kegiatan dengan permasalahan yang nyata ada,



kesesuaian program dan kegiatan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan kemampuan dalam menanggapi dan menangani persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dengan demikian hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa kinerja pemerintah Distrik Kemu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah cukup baik dilihat dari indikator responsivitas.

### Akuntabilitas

Dalam konsep *good governance*, akuntabilitas bermakna bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders* (Kamaluddin, 2019; Sedarmayanti, 2003). Akuntabilitas dapat juga menunjuk pada seberapa besar kebijakan, program dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (Andini *et al.*, 2017; Saputra *et al.*, 2022); karena para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat sehingga dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Namun menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) bahwa akuntabilitas tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal organisasi atau kepentingan eksternal organisasi. Lenvile (dalam Sahala *et al.*, 2015) menyebutkan bahwa akuntabilitas publik dapat dilihat sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik kepada *stakeholders*. Akuntabilitas publik atau birokrasi pemerintah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban birokrasi kepada pejabat politik, kelompok sasaran, pimpinan, kelompok sosial lainnya dalam masyarakat (Nawawi, 2012; Sawir, 2017; Taidi, 2013). Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek manajerial, aspek teknis dan aspek keuangan (Sahala *et al.*, 2015). Poin-poin hasil wawancara dengan informan penelitian terkait dimensi akuntabilitas disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Wawancara Terkait Dimensi Akuntabilitas

No	Indikator	Deskripsi	Informan
1	Pertanggung jawaban pemerintah Distrik Kemu kepada pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) tentang kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan urusan otonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pemerintah Distrik Kemu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) setiap tahun untuk mempertanggungjawabkan kebijakan, program, penggunaan anggaran, dan hasil kegiatan.</li> <li>– LAKIP diterima dan diakui oleh pemerintah atasan (Bupati) dan masyarakat karena disusun secara transparan dan akurat.</li> <li>– Pemerintah Distrik mematuhi prinsip <i>good governance</i> dengan memastikan akuntabilitas melalui mekanisme formal (LAKIP) sesuai regulasi.</li> <li>– LAKIP dipublikasikan secara digital (internet) untuk memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas.</li> <li>– Masyarakat merasa puas dengan transparansi dan kejelasan pertanggungjawaban yang tercantum dalam LAKIP.</li> </ul>	<p>1 – 7</p> <p>1, 3, 4, 5, 6, 7</p> <p>1, 2, 3, 4, 7</p> <p>1, 2, 4</p> <p>5, 6</p>

Sumber: Data primer, 2024. Keterangan informan: (1) Camat/Kepala Distrik; (2) Sekretaris Kecamatan/Distrik; (3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan; (4) Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat; (5) Kepala Kampung/Desa Mamit; (6) Kepala Desa/Kampung Yowo; (7) Pegawai Staf/Pelaksana Kantor Camat/Distrik.

Hasil wawancara dengan informan menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah Distrik Kemu umumnya dinilai oleh para informan sudah cukup baik. Ini artinya bahwa kinerja pemerintah Distrik Kemu dalam pelaksanaan urusan otonom daerah sudah cukup baik dilihat dari indikator/dimensi akuntabilitas.

## Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian di atas bahwa pelaksanaan kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Kalau sebelum berlakunya kebijakan otonomi daerah yang baru kecamatan merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, maka dalam kebijakan otonomi daerah yang baru seperti yang berlaku sekarang ini kecamatan berubah statusnya menjadi perangkat daerah kabupaten/kota dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Dalam hal ini Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain tugas tersebut, Camat juga mengemban tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan (UU No. 23 Tahun 2014).

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kecamatan/Distrik Kumbu dalam pelaksanaan urusan otonomi sudah dapat cukup baik, namun belum semua optimal. Tugas umum pemerintahan seperti koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penyelenggaraan penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di distrik, pembinaan pemerintah desa/kampung, dan pelayanan kepada masyarakat sudah dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Demikian pula, tugas pemerintah kecamatan dalam menangani urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati atau yang ditugaskan oleh Bupati umumnya dapat dilaksanakan dengan cukup efektif walaupun hasilnya belum optimal. Tugas-tugas pembantuan tertentu yang dari pemerintah kabupaten juga dapat dilaksanakan dengan cukup efektif walaupun hasilnya juga belum optimal.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Distrik Kumbu di lihat dari segi efisiensi juga sudah cukup baik namun belum maksimal. Penyerapan dan penggunaan anggaran sudah cukup efisien namun belum optimal. Pemanfaatan prasarana dan sarana kerja juga sudah cukup baik. SDM aparatur juga sudah dapat didayagunakan dengan cukup baik namun belum maksimal.

Kinerja pemerintah Distrik Kumbu dilihat dari segi responsivitas juga cukup baik namun belum maksimal khususnya dalam hal tingkat kesesuaian program dan kegiatan pemerintah distrik dengan permasalahan yang ada di wilayah distrik, kesesuaian antara program dan kegiatan pemerintah distrik dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, dan kecapatan dan ketepatan pemerintah distrik dalam menanggapi dan menangani persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat yang terkait dengan tugas dan kewenangan pemerintah distrik.

Kinerja pemerintah Distrik Kumbu dilihat dari segi akuntabilitas juga sudah cukup baik. Semua kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan urusan otonomi daerah dapat dipertanggung jawabkan secara transparan yaitu melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat pada setiap akhir tahun anggaran. Anggaran yang ditetapkan dan realisasinya untuk semua program dan kegiatan dilaporkan secara rinci dan transparan dalam LAKIP, sehingga selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk oleh masyarakat.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Distrik Kumbu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah belum cukup baik namun belum maksimal dilihat dari indikator/dimensi: produktivitas (efektivitas dan efisiensi), responsivitas, dan akuntabilitas. Belum optimalnya kinerja pemerintah Distrik Kumbu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah tersebut disebabkan oleh beberapa kendala/hambatan. Menurut pengakuan kepala distrik dan sekretaris distrik, dan juga dibenarkan oleh informan lainnya yang sempat diwawancarai, bahwa kendala utama dalam optimalisasi tugas kepala distrik adalah jumlah dan mutu sebagian aparat/pegawai distrik yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan urusan otonomi daerah secara efektif, efisien dan responsif. Jumlah aparat/pegawai kantor kepala distrik dirasakan masih kurang/tidak memadai, dan sebagian besar hanya tamatan SLTA dan merupakan pegawai golongan II dan masih kurang pengalaman kerja (pegawai baru). Kendalam lainnya adalah faktor prasarana, peralatan dan fasilitas pelaksanaan tugas masih minim, serta anggaran/dana yang belum cukup untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah distrik secara keseluruhan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah Distrik Kumbu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah maka SDM aparat pemerintah distrik harus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas; kondisi prasarana, peralatan dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas harus tersedia secara memadai; anggaran/dana untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah distrik harus mencukupi. Jika hal-hal tersebut dapat ditingkatkan maka dapat dipastikan kinerja pemerintah Distrik Kumbu dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih baik

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa kinerja Pemerintah Distrik Kumbu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah, jika dilihat dari indikator produktivitas, menunjukkan capaian hasil atau tujuan program yang telah ditetapkan melalui kegiatan pemerintahan yang mengacu pada efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Efektivitas dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang ditetapkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, efektivitas kinerja Pemerintah Distrik Kumbu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan cukup baik. Sementara itu, efisiensi menggambarkan rasio antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan, di mana suatu program dikatakan efisien apabila target dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Efisiensi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dinilai cukup baik meskipun belum maksimal, termasuk dalam hal penyerapan dan penggunaan anggaran, pemanfaatan sarana dan prasarana kerja, serta penggunaan potensi SDM aparat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, kinerja Pemerintah Distrik Kumbu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah dari indikator responsivitas menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menanggapi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan umumnya telah sesuai dengan permasalahan nyata di wilayah distrik serta dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah distrik juga cukup responsif dalam menangani berbagai persoalan masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pemerintah distrik, serta dalam merespons dinamika lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan otonomi daerah. Terakhir, dari indikator akuntabilitas, kinerja Pemerintah Distrik Kumbu menunjukkan bentuk pertanggungjawaban birokrasi yang cukup baik kepada pejabat politik, kelompok sasaran, pimpinan, kelompok sosial, dan masyarakat. Semua kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun anggaran. Pemimpin memiliki pengaruh dalam kebijakan serta dalam sistem kelembagaan dan organisasi pemerintahan distrik, yang menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja ke depan.

### Saran

Bertolak dari hasil penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah Distrik Kemu dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah, yaitu:

1. Dalam rangka meningkatkan produktivitas (efektivitas dan efisiensi), maka pemerintah distrik hendaknya dialokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai program dan kegiatannya. Juga penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana kerja pemerintah Distrik perlu dilakukan mengingat kondisi prasarana dan sarana yang dimiliki sekarang ini sangat tidak memadai. Pegawai/aparatur pemerintah Distrik Kemu perlu ditambah karena masih kurang. Kualitas SDM aparatur/pegawai juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai.
2. Dalam rangka meningkatkan responsivitas, maka pemerintah Distrik Kemu hendaklah dapat memahami dengan baik setiap persoalan dalam masyarakat serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga program dan kegiatan yang dilakukan akan selalu sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
3. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, maka pemerintah Distrik Kemu harus berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara lebih transparan, dan disusun tepat waktu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andini, R., Amin, M. J., Dyastari, L., Sos, S., & Si, M. 2017. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di kantor camat tenggarong kabupaten kutai kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 1571-1582.
- Agusnawati, R., Nurfadillah, N., Wiradana, N., & Mukhtar, A. 2024. Efektivitas Evaluasi Strategi dalam Manajemen Pengendalian Mutu Organisasi. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(1), 87-105.
- Bungin, B. M. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Burhanuddin, B., Syufri, S., Asriani, A., Hartawan, H., & Saputra, A. N. 2024. Exploring the role of regional capacity in human resource development in Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 6, 1412098.
- Bunga, M. 2020. Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818-833.
- Dako, R. D. R., Abdussamad, S., Nasibu, I. Z., Tolago, A. I., & Mohamad, Y. 2024. Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Pengelolaan Surat untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja Aparat di Desa Tunggulo. *Empiris Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 78-85.
- Dwiyanto, A. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Hasjimzum, Y. 2014. Model demokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi otonomi daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca reformasi). *Jurnal dinamika hukum*, 14(3), 445-457.
- Juru, N. A. 2020. Analisis Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 408-421.
- Kamaluddin, S. 2019. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222-228.

- Kaminisubun, C., Tulusan, F., & Palar, N. 2018. Kinerja PT. PLN (Persero) Dalam Menanggapi Keluhan Pelanggan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(60).
- Maryanto, A. 2019. *Analisis Efisiensi Jumlah Pegawai Pajak dan Anggaran terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Mensah, J. V., Aikins, A. E., Essaw, D. W. 2024. Analyzing the district performance assessment tool in local governments in Ghana. *R-Economy*, 10(3), 302–313.
- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Redoskarya.
- Nawawi, J. 2012. Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. *Jurnal ilmiah ilmu Pemerintahan*, 1(3), 19-29.
- Nilamsari, N. 2014. Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177-181.
- Qosasi, A., & Riharjo, I. B. 2022. Pengukuran Kinerja Dalam Prespektif Value for Money Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(6).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. 2017. Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Rohidi, R., & Mulyarto, T. 2002. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. 2015a. Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Rondonuwu, A., Rompas, W. Y., & Pombengi, J. D. 2015b. Implementasi good governance di kecamatan pasan kabupaten minahasa tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(029).
- Sahala, J. N., Dengo, S., & Londa, V. 2015. The Performance of Secretariat DPRD to Appreciation the Implementation of function DPRD North Sulawesi Provincie. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(029).
- Sanjaya, D. H., & Priyadi, M. P. 2019. Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Saputra, D. E., Hamdi, M., & Rowa, H. 2022. Kinerja Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Renah Sungai Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *JOGS: Journal of Government Studies*, 1(1).
- Sawir, M. 2017. Konsep akuntabilitas publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 10-18.
- Simanjuntak, R. T. L., Todingbua, M. A., & Buku, A. 2025. Efisiensi Penganggaran dalam Melaksanakan Program Kerja di Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 3(2).
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suoth, R. S., Mandey, J., & Rompas, S. 2014. Kajian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 3(001).
- Taidi, D. 2013. Kinerja Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulut. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Tantowi, R. 2019. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 175-185.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU.No.21 Tahun 2001.*

*Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.*